

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Kondisi rawan bencana di Indonesia disebabkan oleh wilayah geografis yang terletak pada lokasi cincin api atau "*ring of fire*" meliputi wilayah barat Amerika Selatan dan terbentang melewati Indonesia hingga di sisi timur benua Australia. Selain itu, wilayah Indonesia juga menjadi titik pertemuan tiga lempeng benua yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Letak geografis Indonesia menjadi salah satu faktor risiko bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, cuaca ekstrem, banjir dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana merupakan bagian penting dalam proses pembangunan nasional. Setiap tahun negara Indonesia selalu dihadapkan pada bencana yang beragam dan tersebar di seluruh negeri. Indonesia memiliki 12 jenis bencana yang berisiko tinggi, yaitu: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan, epidemic dan wabah penyakit, dan gagal teknologi (BNPB, 2014).

Salah satu bencana yang rutin dialami masyarakat setiap tahun adalah banjir, hampir disetiap musim penghujan bencana banjir terjadi pada beberapa wilayah di

Indonesia. Banjir tidak hanya muncul di kota-kota besar tetapi juga di beberapa kota dan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Pulau Jawa dengan luas hanya 6,75% dari total wilayah Indonesia memiliki persentase jumlah penduduk sebesar 56,10% dengan total 151,6 juta jiwa. (sumber: Badan Pusat Statistik dalam www.inews.id diakses pada 12 Februari 2021 pukul 17.30 WIB). Sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia, bencana yang terjadi dapat berisiko menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa.

Lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu: faktor penghujan, faktor retensi daerah aliran sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana (Maryono, 2005). Bencana banjir sudah seperti tamu tahunan bagi masyarakat di pulau Jawa, khususnya pada beberapa wilayah dataran rendah dengan tingkat debit air yang seringkali melebihi kapasitas.

Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa dan mengalirkan DAS seluas 16.000 km², mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, ke laut Jawa di utara melalui alur sepanjang 600 km (Sistem Informasi Balai Besar Sungai Bengawan Solo, www.sda.pu.go.id diakses pada 12 Februari 2021 pukul 17.30 WIB). Sebagai sungai terbesar di Pulau Jawa, Bengawan Solo setiap tahunnya selalu menimbulkan bencana banjir di beberapa wilayah DAS. BPBD sebagai pihak yang berwenang dalam penanggulangan bencana di daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap proses mitigasi, respons dan pascabencana khususnya pada wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana banjir dari luapan sungai Bengawan Solo.

Salah satu daerah yang paling rawan terhadap bencana banjir karena dilintasi DAS Bengawan Solo adalah Kota Surakarta. Melihat pentingnya pengurangan risiko bencana

banjir, diperlukan adanya analisis pada tingkat kerentanan Kota Surakarta terhadap bencana banjir. Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya (BNPB, 2014). Kerentanan meliputi beberapa aspek yaitu lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi. Berikut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan bencana banjir:

Tabel 1. 1 Faktor-faktor yang berbengaruh dalam bencana banjir
(Utomo dalam Istikomah, 2014)

Faktor	Parameter Penilaian Kerentanan Banjir
Kerentanan dari Aspek Lingkungan	
Intensitas Curah Hujan	Semakin tinggi intensitas curah hujan maka semakin rentan terhadap bencana banjir
Kelerengan	Kemiringan tanah suatu wilayah
Drainase	Semakin sedikit drainase maka semakin rentan terhadap banjir
Penggunaan Lahan	Semakin tinggi tutupan lahannya maka semakin rentan terhadap banjir
Jenis Tanah	Semakin rendah daya serapnya maka semakin rentan terhadap banjir
Kerentanan dari Aspek Fisik	
Rasio Jaringan Jalan	Semakin rendah ketersediaan jalan dan buruknya kondisi jalan maka akan semakin rentan terhadap banjir

Tingkat Kepadatan Bangunan	Semakin tinggi tingkat kepadatan bangunan maka semakin rentan terhadap bencana banjir
Kerentanan dari Aspek Sosial	
Tingkat Kepadatan Penduduk	Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin rentan terhadap bencana banjir
Persentase Jumlah usia tua-balita	Semakin banya jumlah usia tua dan balita maka semakin rentan terhadap bencana banjir
Kerentanan dari Aspek Ekonomi	
Persentase rumah tangga miskin	Semakin banyak rumah tangga maka semakin rentan terhadap bencana banjir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istikomah (2014) berjudul “*Zonasi Tingkat Kerentanan (Vulnerability) Banjir Daerah Kota Surakarta*” menunjukkan bahwa persebaran kerentanan banjir di Kota Surakarta dapat diklasifikasikan yaitu: agak rentan (37,5%), rentan (61,63%), dan sangat rentan (0,85%). Kondisi lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi tersebut saling memengaruhi dan menyebabkan Kota Surakarta menjadi wilayah yang rentan terhadap banjir. Tekstur kemiringan tanah, kepadatan bangunan yang tinggi, serta kerapatan drainase di Kota Surakarta mengakibatkan tidak adanya wilayah yang tidak rentan terhadap banjir.

Hujan yang mengguyur wilayah Solo selama satu malam pada hari Rabu, 3 Februari 2021 menjadi penyebab meluapnya air sungai Bengawan Solo dan menggenang beberapa daerah di Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Adapun wilayah yang diterjang banjir cukup parah hingga Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Surakarta harus melakukan evakuasi terhadap 25 keluarga di RW 002 Kelurahan

Sewu, Kabupaten Jebres, Kota Surakarta (sumber: www.surakarta.suara.com diakses pada 13 Februari 2021).

Tabel 1. 2 Ketinggian dan kemiringan tanah di Kecamatan Jebres
(Hamdikatama dkk, 2019)

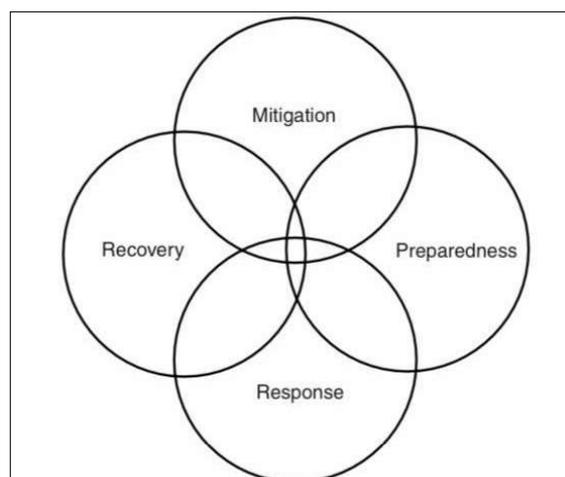
No	Kelurahan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (%)
1	Sudiroprajan	86	11
2	Gandekan	87	12
3	Sewu	83	9
4	Pucangsawit	89	9
5	Jagalan	85	7
6	Purwodiningratan	92	12
7	Tegalharjo	95	11
8	Jebres	95	13
9	Mojosongo	89	12
10	Kepatihan	86	9

Hamdikatama, dkk (2019) menjelaskan Kota Surakarta berada pada wilayah cekungan sehingga mempunyai topografi ketinggian tempat antara 80 – 100 mdpl, Kota Surakarta juga berada pada wilayah cekungan sehingga mempunyai topografi kemiringan yang relatif datar di bawah 15%. Kelurahan Sewu yang terletak di bantaran sungai Bengawan Solo menjadi daerah yang paling sering terkena dampak banjir karena memiliki ketinggian tanah paling rendah, yaitu 83 mdpl dengan tingkat kemiringan 9%. Sebagai wilayah yang tergolong rentan terhadap bencana banjir maka diperlukan adanya

sistem manajemen bencana sebagai perencanaan maupun antisipasi terhadap bencana yang akan datang.

Coppola dan Maloney (dalam Budi, 2011) menyatakan bahwa manajemen bencana modern mencakup empat komponen fungsional, yaitu; *mitigation* yang mencakup reduksi atau mengeliminiasi komponen risiko bahaya. Kedua *preparedness*, yang meliputi edukasi kepada masyarakat yang memiliki risiko terkena bencana atau diberikan kemampuan untuk membantu orang lain pada peristiwa bencana dengan berbagai peralatan untuk meningkatkan kemampuan bertahan terhadap risiko lainnya. Ketiga *response*, mencakup tingkatan yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana dan keempat *recovery*, mencakup perbaikan, rekonstruksi, dan idealnya mampu mengurangi risiko kerugian atau kerusakan yang sama pada masa yang akan datang.

Simonovi'c (2010) mengemukakan mengenai pendekatan sistem manajemen bencana, bahwa manajemen bencana terintegrasi adalah pengambilan keputusan yang terusmenerus mengacu pada pencegahan, respons dan pemulihan dari suatu peristiwa bencana. Secara singkat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 The Venn diagram of integrated disaster management (Simonovi'c, 2010)

Pada penjelasan lebih lanjut, Simonovi'c (2010) mengemukakan tentang pentingnya mitigasi sebagai proses jangka panjang termasuk dengan identifikasi aspek kerentanan wilayah, mengacu pada ancaman bahaya, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil demi meminimalisir risiko. Tujuannya adalah untuk mencapai kesiapan terhadap berbagai risiko yang dapat ditimbulkan serta mampu mengatasi berbagai masalah secara efektif.

Kesadaran masyarakat terhadap risiko banjir yang dapat terjadi setiap tahun merupakan salah satu unsur kesiapan dalam menghadapi bencana. Untuk mengurangi risiko bencana, diperlukan adanya strategi komunikasi yang efektif agar kegiatan penurunan risiko bencana dapat berjalan optimal. Tingkat keberhasilan suatu pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat sangat bergantung pada bagaimana penerapan strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Haddow dan Haddow (dalam Budi, 2011) menyebutkan pentingnya fokus pada target khalayak, artinya memahami karakteristik khalayak untuk memastikan pesan dan media untuk isu kebencanaan bisa mendorong ke tindakan dan perilaku mitigasi bencana.

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian ini, peneliti paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian pertama ditulis oleh Anita Cahya Ningrum (2013) yang berjudul "*Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Surakarta*" menunjukkan bahwa bencana banjir di daerah tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir, tidak adanya daerah peresapan air atau penghujan, tidak adanya jalur evakuasi, tidak adanya tim penanggulangan bencana banjir dan kurangnya perhatian instansi terkait dalam menanggulangi bencana banjir. Berdasarkan

hasil indeks kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir adalah 59,22% yang termasuk dalam kategori hampir siap.

Perbedaan penelitian Ningrum dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian yang diambil, Ningrum mengambil fokus penelitian pada faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan dan indeks tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kelurahan Sewu. Sedangkan penelitian ini akan fokus meneliti mengenai strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Kelurahan Sewu.

Penelitian kedua ditulis oleh Erwind Saputra (2018) berjudul "*Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Banjir di Kabupaten Kampar*" menjelaskan bahwa manajemen komunikasi BPBD Kabupaten Kampar terdiri dari: 1) Perencanaan komunikasi BPBD Kampar disusun di dalam Renja dan Renstra BPBD Kabupaten Kampar. 2) Pengorganisasian komunikasi BPBD Kabupaten Kampar disusun secara formal dan dibagi menjadi tiga bidang yakni bidang Pencegahan (PK), bidang Kedaruratan dan Logistik (KL), dan bidang Rehabilitasi dan Konstruksi (RR). 3) Pelaksanaan komunikasi BPBD Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh bidang khusus yang disebut dengan Pusdalops yang di dalamnya memiliki unit khusus yakni Tim Reaksi Cepat. 4) Evaluasi komunikasi BPBD Kabupaten Kampar dilakukan setiap harinya jika terjadi bencana, jika tidak terjadi bencana evaluasi pada rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat dadakan yaitu rapat yang dilakukan pada saat terjadi bencana.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Erwind terletak pada objek dan fokus penelitian yang diambil, fokus yang dilakukan Erwind adalah untuk mengetahui manajemen komunikasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Kampar dalam menghadapi

bencana banjir dengan tiga unsur yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan pada penelitian ini akan fokus pada bagaimana strategi komunikasi bencana yang diterapkan BPBD Kota Surakarta di wilayah Kelurahan Sewu dalam upaya mitigasi bencana banjir.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ditha Prasanti dan Ikhwan Fuady berjudul *“Strategi Komunikasi dalam Kesiapan Menghadapi Bencana Longsor bagi Masyarakat di Bandung Barat”* menunjukkan adanya strategi komunikasi interaktif dalam kesiapan menghadapi bencana longsor bagi masyarakat di kaki gunung Burangrang, Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut: 1) Penentuan aparat desa/tokoh masyarakat sebagai komunikator/sumber yang kredibel; 2) Pemilihan pesan yang mudah diterima oleh masyarakat di kawasan kaki gunung Burangrang; 3) Penggunaan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat desa; 4) Pemahaman karakteristik masyarakat desa; 5) Mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi selama pelaksanaan strategi komunikasi tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Prasanti terletak pada objek penelitian yang diambil, objek penelitian terletak pada wilayah kaki gunung Burangrang di Kabupaten Bandung Barat dengan dampak risiko bencana longsor. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta di wilayah Kelurahan sewu dalam menghadapi risiko bencana banjir.

Penelitian keempat dilakukan oleh Lestari, dkk (2012) yang berjudul *“Manajemen Komunikasi Bencana Sinabung 2010 pada saat Tanggap Darurat”* menyatakan penilaian kondisi darurat dilakukan dengan cara komunikasi kelompok dengan mengumpulkan berbagai informasi secara sistematis yang dilakukan oleh berbagai elemen perangkat masyarakat dimulai dari tingkat RT/RW, desa, kecamatan, dan

kelurahan. Komunikasi yang berlangsung sangat penting sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, beberapa persoalan yang ditemukan mendorong perlunya sistem manajemen komunikasi bencana khususnya dalam situasi tanggap darurat untuk mengurangi dampak risiko pascabencana.

Perbedaan penelitian Lestari dkk dengan penulis terletak pada fokus penelitian yang diambil, fokus penelitian Lestari dkk adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen komunikasi bencana gunung Sinabung pada tahun 2010 saat kondisi tanggap darurat, sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta pada saat pra bencana.

Penelitian kelima berjudul "*Strategi Komunikasi Bencana pada Masyarakat Kabupaten Buton Selatan*" yang ditulis oleh Ansar Suherman (2018) menyatakan komunikasi dalam bencana tidak hanya dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tetapi juga penting pada saat pra bencana. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Cara menyampaikan informasi juga harus dilakukan dengan tepat, kekeliruan dalam mengomunikasikan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk situasi sehingga pendekatan komunikasi budaya dan lintas budaya sangat dibutuhkan.

Perbedaan penelitian Suherman dengan penulis terletak pada objek dan fokus penelitian yang diambil, fokus penelitian Suherman terletak pada strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam menghadapi risiko bencana di daerah Kabupaten Buton. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana dari lembaga BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu.

Penelitian keenam ditulis oleh Decky Kuncoro dan Indrawati (2019) berjudul *“Proses Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Bantul”* menyatakan kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan kabupaten Bantul terlaksana melalui program dan kegiatan yang meliputi mitigasi struktural dan non struktural. Kebijakan proses implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan dipengaruhi oleh komunikasi yang digunakan pemerintah Kabupaten Bantul yakni komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

Perbedaan penelitian Kuncoro dan Indrawati dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang diambil, fokus penelitian Kuncoro dan Indrawati adalah untuk mengetahui proses komunikasi dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana di kawasan pesisir selatan di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada penerapan strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Novella Wulia Saqinah (2019) berjudul *“Strategi Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau”* menyatakan bahwa: 1) Strategi menentukan komunikator adalah orang-orang (pegawai) BPBD Provinsi Riau dilihat dari segi kredibilitasnya yang berpengetahuan luas, mempunyai pengalaman, pernah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat; 2) Strategi menentukan khalayak sasaran utama adalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran; 3) Strategi pesan terdapat tiga jenis yaitu infomatif, persuasive, dan pesan yang bersifat ancaman; 4) Strategi pemilihan media komunikasi yang digunakan BPBD Provinsi Riau yaitu

website (bpbdr.riau.go.id), media sosial Facebook dan Instagram serta media luar ruangan berupa spanduk, baliho, dan brosur.

Perbedaan penelitian Saqinah terletak pada fokus dan objek penelitian yang diambil, penelitian Saqinah fokus pada strategi komunikasi BPBD Provinsi Riau terhadap masyarakat di kawasan rawan kebakaran hutan, sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta di wilayah Kelurahan Sewu dalam menghadapi risiko bencana banjir.

Penelitian kedelapan berjudul "*Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor dan Upaya Masyarakat dalam Penanggulangan*", ditulis oleh Murdiyanto dan Tri Gutomo (2015) menyimpulkan Kota Jayapura merupakan daerah yang termasuk rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Kebijakan pemerintah dalam penanganan risiko bencana lebih bersifat komprehensif dan dititikberatkan pada upaya preventif, tidak hanya pada saat terjadinya bencana alam. Bencana alam yang terjadi di Kota Jayapura disebabkan adanya alih fungsi wilayah konservasi menjadi lahan kegiatan pertanian dan pemukiman penduduk, penebangan tidak terkontrol, pembuatan drainase kurang baik, dan penyusunan tata ruang kota tanpa dilakukan studi kelayakan. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan bencana alam banjir yaitu dengan memberi penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat tentang manfaat penghijauan dan dampak pembuangan sampah sembarangan, pengerukan dasar sungai, serta pelebaran sungai.

Perbedaan penelitian Murdiyanto dan Gutomo terletak pada fokus dan objek penelitian yang diambil, penelitian Murdiyanto dan Gutomo meneliti penyebab bencana alam banjir dan tanah longor serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana

BPBD Kota Surakarta di wilayah Kelurahan Sewu dalam upaya mitigasi bencana banjir yang terjadi setiap tahun.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Virgia Fadillah (2019) yang berjudul *“Komunikasi Bencana dalam Penanganan Erupsi Gunung Agung: Studi Deskriptif di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem”* menyatakan tindakan komunikasi pada tahap pra bencana diantaranya adalah melakukan edukasi, sosialisasi, pemetaan daerah rawan bencana, pembuatan rambu peringatan dini dan simulasi bencana. Tindakan komunikasi tanggap darurat bencana memiliki beberapa hambatan dalam kegiatan evakuasi dan himbauan masyarakat untuk mengungsi, diperlukan adanya pendekatan psikologis sehingga warga yang menolak untuk mengungsi terutama pada masyarakat usia lanjut dapat dihindari. Sedangkan pada tahap pascabencana tindakan komunikasi berupa rehabilitasi dan rekonstruksi pada beberapa jalan yang rusak sampai tingkat memadai untuk bisa mencapai normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana.

Perbedaan penelitian Fadillah dengan penelitian ini terletak pada fokus dan objek penelitian, fokus penelitian Fadillah terletak pada kegiatan komunikasi saat pra hingga masa tanggap darurat bencana serta strategi pemulihan wilayah pada masa pascabencana. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi pada pra bencana di wilayah Kelurahan Sewu.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Lusiana Laras Kristanti, Nurprapti Wahyu, dan Ail Muldi (2019) berjudul *“Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Serang”* menyatakan perencanaan komunikasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Serang dengan Menyusun program kerja pengurangan risiko bencana banjir

berdasarkan penemuan fakta telah dilakukan. Program kerja kemudian diajukan kepada pemerintah dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Program terdiri dari empat bentuk program yaitu sosialisasi dan simulasi, pembentukan relawan bencana, koordinasi dengan instansi, dan penyebaran informasi melalui media massa. Pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana banjir dilakukan oleh bagian pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serang. Evaluasi seluruh kegiatan dilakukan dalam tiga tahap yaitu melalui rapat internal panitia pelaksana kegiatan, rapat bulanan, dan peninjauan kembali daerah-daerah tempat pelaksanaan program kerja.

Perbedaan penelitian Kristanti dkk terletak pada fokus dan objek penelitian, fokus penelitian Kristanti dkk terletak pada proses komunikasi dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Serang. Sedangkan penelitian ini akan fokus pada strategi komunikasi bencana yang diterapkan oleh BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana di wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan dan implementasi strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah pemikiran komunikasi kebencanaan terutama dalam bidang strategi komunikasi bencana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi BPBD Kota Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi pemerintah Kota Surakarta khususnya BPBD Kota Surakarta dalam penerapan strategi komunikasi bencana dalam upaya mitigasi bencana banjir guna mengurangi risiko dampak bencana di wilayah Kelurahan Sewu.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam kajian komunikasi kebencanaan di wilayah rawan risiko banjir.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berpikir penulis dalam tahapan dan implementasi strategi komunikasi bencana khususnya pada tahap mitigasi.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan menghadapi risiko bencana banjir.

E. Kajian Teori

1. Bencana dalam Tinjauan Teoretis

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2014). Secara umum penyebab bencana dibagi dua yaitu; faktor alam (*natural disaster*) atau faktor manusia (*man made disaster*).

Porifiev (dalam Tamitiadini dkk, 2019) dari kajian tentang wilayah bencana membagi bentuk penanganannya menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Emergency or accurate disaster area*, bencana yang dipicu oleh kejadian alam, teknologi, sosial politik, banjir, gempa bumi, tornado, badai, gunung meletus, kebakaran dan sebagainya. Tindakan dalam penanganan bencana ini termasuk kategori *urgent (extraordinary) short term action*, yaitu tindakan segera dalam penanganan bencana. Selain itu juga terkait dengan tindakan terhadap bencana yang bersifat kronis.
- b. *Chronic disaster areas* atau biasanya disebut sebagai area bencana yang memiliki akibat jangka yang panjang seperti misalnya bencana kelaparan, kontaminasi radioaktif pada lingkungan dan sebagainya. Tindakan penanganan dalam bencana jenis ini adalah *medium and long term action*. Biasanya terdapat wilayah bencana susulan atau terjadi di wilayah lain yang berikutnya sebagai dampak dari bencana sebelumnya.

Claude Gilbert (dalam Tamitiadini dkk, 2019) menyampaikan konsep tentang bencana dalam tiga paradigme yaitu: Pertama, bencana merupakan hasil atau akibat dari suatu tekanan eksternal. Kedua, akibat dari kerentanan sosial dan ketiga akibat dari ketidakpastian. Penjabaran lain tentang konsep ini adalah sebagai berikut: Pertama, bencana adalah akibat dari kondisi sosial dan lingkungan yang buruk. Kedua, bencana merupakan akibat dari tekanan kolektif dari sebuah komunitas, dan ketiga adalah adanya perbedaan kapasitas untuk menangani kerusakan dan akibat negatif yang ditimbulkan. Sehingga dari keduanya dapat diketahui bahwa bencana merupakan peristiwa yang mengakibatkan kerusakan, kematian, kehilangan dan dampak buruk lainnya termasuk beberapa jenis peristiwa alam yang dianggap menimbulkan bencana.

Bencana alam dipandang sebagai situasi yang menciptakan tantangan dan masalah terutama kemanusiaan. Manesh (2017) menjelaskan, bencana alam dibagi menjadi tiga jenis yaitu; bencana biologis, bencana geospasial, dan bencana hidrometeorologis.

- a. Bencana biologis, merupakan proses yang berasal dari organik atau yang ditimbulkan oleh faktor biologis, termasuk paparan patogen (penyakit), mikroorganisme, racun, dan zat bioaktif lainnya.
- b. Bencana geospasial, merupakan proses alam atau fenomena yang mengakibatkan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longor, letusan gunung api, serta degradasi lingkungan sehingga dapat mengancam kehidupan manusia.

- c. Bencana hidrometeorologis, yaitu proses alami atau fenomena di atmosfer, hidrologi atau berhubungan dengan kelautan yang dapat menimbulkan bencana alam seperti gelombang tinggi, badai, kekeringan, suhu ekstrem, dan banjir.

2. Konsep Komunikasi Bencana

Komunikasi dalam kebencanaan berada pada kedudukan yang vital dalam menentukan suksesnya manajemen penanggulangan bencana. Menurut Harold Lasswell (dalam Mulyana, 2016), komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa yang berbicara apa, untuk siapa, dan efeknya apa (*who says what in which channel to whom with what effect*). Menurut Everett M Rogers (dalam Cangara, 2007), komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran pesan dari antara dua orang atau lebih baik secara verbal maupun non verbal yang berisi pesan atau tujuan tertentu.

Pada era modern, kebutuhan akan komunikasi bencana secara efektif yang melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi harus dapat diimplementasikan oleh pemerintah kepada masyarakat daerah terdampak bencana. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah belum adanya manajemen komunikasi bencana secara komprehensif terutama yang dilakukan oleh Humas Pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana alam. Secara spesifik, persoalan prioritas yang harus dilakukan adalah mengacu pada KIKK (Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerjasama). Hal ini mutlak dibutuhkan karena dibutuhkan pembaruan informasi yang cepat, tepat, dan akurat (Budi,

2011:364).

Kebutuhan informasi mengenai lokasi korban, jumlah korban dan pendataan kebutuhan korban amat dibutuhkan untuk mempermudah petugas dan relawan saat membantu para korban. Beberapa kondisi di lapangan seperti panik, cemas dan ketakutan rentan terjadi kesimpangsiuran informasi dan pembagian bantuan logistik yang tidak merata yang menyebabkan penanggulangan bencana menjadi lambat (Mahdia dan Noviyanto, 2013: 163). Persoalan KIKK ini juga penting dilakukan bukan hanya dalam hal memberikan informasi yang akurat seputar bencana, tetapi juga dapat membangun empati publik serta mendorong masyarakat yang tertimpa bencana untuk dapat bangkit dari permasalahan yang timbul akibat bencana alam yang terjadi. Pembahasan mengenai komunikasi, informasi, koordinasi, dan kerja sama antar pihak pemerintah dengan masyarakat terdampak bencana menjadi sesuatu yang penting dan harus segera direalisasikan.

Informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam proses penanganan bencana. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tetapi juga sangat penting pada saat pra hingga pascabencana. Salah satu fokus penting dalam proses komunikasi dalam bencana adalah masalah ketidakpastian. Menurut Frank Dance (dalam Littlejohn, 2006), salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individu maupun kelompok.

Sistem komunikasi yang akuntabel berperan sangat penting dalam upaya

mitigasi bencana. Sebuah wilayah dikatakan maju jika ia mampu melakukan penanggulangan bencana secara mandiri dengan kemampuan masyarakat dan badan organisasi di dalamnya (Tamitiadini dkk, 2019). Akuntabilitas sistem mitigasi bencana dapat dilihat dari, Pembangunan Institusi, Penyebarluasan Informasi dan Pertukaran Informasi. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi merupakan cara terbaik untuk menyukseskan manajemen bencana. Kemampuan untuk mengomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi risiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow dan Haddow, 2008).

Tujuan dalam proses komunikasi bencana adalah meningkatnya kesadaran pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya *mitigation, preparedness, response, dan recovery* bencana sehingga masyarakat selalu siap ketika bencana terjadi dan berdampak pada minimnya korban jiwa. Implementasi yang dapat dilakukan dalam upaya melakukan komunikasi bencana adalah dengan melakukan beberapa kegiatan seperti *Forum Group Discussion (FGD)*, penyuluhan dan *workshop*, serta pengadaan alat bantuan sesuai dengan kebutuhan lokasi yang terdampak bencana. Pelaksanaan upaya tersebut harus memiliki keluaran atau output yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan upaya mitigasi bencana. Hasil dari implementasi tersebut dapat diamati dari perbandingan antara sebelum dan sesudah *post-test presentase* (Nurjanah dan Sakir, 2020: 20).

Konsep komunikasi bencana ini berperan dalam mengurangi ketidakpastian yang menjadi karakteristik sebuah bencana dan dimaksudkan untuk

meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda. Komunikasi menjadi aktivitas utama upaya penanggulangan bencana khususnya pada fase mitigasi yang berpengaruh pada masyarakat dan harus dimulai jauh sebelum bencana terjadi. Antisipasi sedini mungkin mampu menekan jumlah kerugian yang dapat ditimbulkan sehingga masyarakat diharapkan memiliki sikap, tindakan, dan perilaku yang menekankan kesadaran manusia dan peningkatan kemampuan manusia menghadapi ancaman bencana.

3. Strategi Komunikasi Bencana

Istilah komunikasi bencana belum menjadi konsep populer dalam bidang komunikasi maupun bidang kebencanaan. Meski penelitian komunikasi bencana sendiri telah banyak dilakukan, namun di Indonesia kajian komunikasi terkait bencana baru banyak dilakukan setelah peristiwa bencana alam gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Meski demikian, kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam penanganan bencana semakin tinggi belakangan ini. Salah satu titik penting yang menjadi perhatian terkait komunikasi dalam bencana adalah masalah ketidakpastian. Menurut Frank Dance (dalam Littlejohn, 2006), salah satu aspek penting di dalam komunikasi adalah konsep reduksi ketidakpastian.

Komunikasi sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan

dalam kondisi darurat bencana, tetapi juga penting pada pra, saat, dan pascabencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respons, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi risiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow and Haddow, 2008).

Menurut Haddow dan Haddow (2008:2) terdapat 4 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu :

1. *Customer Focus*, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
2. *Leadership commitment*, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
3. *Situational awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
4. *Media partnership*, media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerja sama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk berkerja sama

dengan media untuk mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik.

Bencana alam merupakan salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia. Beberapa bencana alam tidak dapat dihindari karena berkaitan erat dengan kondisi alam dan faktor lingkungan atau daerah pemukiman itu sendiri. Selain adanya lembaga yang bertugas untuk menangani dampak bencana alam, dibutuhkan juga strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat yang memiliki risiko bencana. Midleton (dalam Cangara, 2017) menjelaskan strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Strategi komunikasi pada hakikatnya merupakan paduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan (Effendy, 2009).

Unsur komunikasi yang turut menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan strategi komunikasi adalah pelaku komunikasi baik dari unsur *government*, *society*, maupun pihak lain yang terlibat. Tingkat keberhasilan suatu strategi yang berkaitan dengan masyarakat bergantung pada bagaimana pendekatan strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat. Terdapat tiga pendekatan dalam strategi komunikasi menurut Berger (Ebert dan Griffin, 2006), yaitu strategi pasif, aktif, dan interaktif. Di antara ketiga pendekatan di atas, pendekatan interaktif merupakan strategi yang lebih disarankan karena pendekatan ini lebih

mengedepankan nilai-nilai humanis serta budaya baru yang mampu mengubah *mindset* masyarakat tentang pembangunan. Penerapan strategi dengan menggunakan pendekatan ini lebih mengedepankan pada proses pendidikan masyarakat agar memiliki kesadaran.

Kesadaran inilah yang kemudian diharapkan mampu menjadi pendorong bagi masyarakat dalam proses penanganan bencana secara lebih luas terkait dengan strategi penanganan bencana di masyarakat. Untuk menurunkan risiko bencana, tentu dibutuhkan suatu strategi komunikasi yang efektif agar proses mitigasi bencana dapat berjalan secara optimal. Melalui strategi komunikasi, BPBD sebagai pelaku komunikasi kebencanaan dapat lebih mudah menyebarkan pesan komunikasi secara sistematis baik yang bersifat informatif, persuasif, hingga ke tahap instruktif kepada masyarakat.

4. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana secara garis besar didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dan bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan (Kings dalam Kusumasari, 2014). Pelaksanaan mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, maupun secara langsung oleh masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Mitigasi bencana menurut Godschalk (dalam Kuncoro 2019) dapat

dilakukan melalui 2 jenis kegiatan yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Adapun kegiatan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan mitigasi bencana yaitu; 1) Mitigasi struktural dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa dan tsunami, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan bendungan, penambahan area dan jalur drainase, dan kegiatan fisik lainnya dengan tujuan pengurangan risiko bencana; 2) Mitigasi non-struktural dapat dilakukan dengan penyusunan peraturan perundangan, penyusunan peta jalur evakuasi, penyusunan peta risiko bencana.

Pentingnya informasi bagi masyarakat mengenai bencana juga dikemukakan Coppola dan Malloney (dalam Tamitiadini dkk, 2019):

“Once an audiens is informed sufficiently and appropriacately about a hazard, they are primed to receive and process information that will help them take appropriate action to reduce their vulnerability to one or more hazard risk.”

Menurut konsep tersebut, tujuan akhir dari manajemen penanganan bencana adalah peringatan dini bagi masyarakat. Peringatan dini membuat masyarakat menjadi lebih waspada dan tersedianya informasi resmi untuk kemudian mengambil tindakan yang lebih tepat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin mengetahui tentang tahapan dan implementasi strategi komunikasi bencana BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan

penemuan. Seperti disampaikan oleh Iskandar (2009) pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sehingga pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2012). Menurut Hadari Nawawi (2007) metode deskriptif dapat dimaknai sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi (Poerwadani, 2005). Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menyimpulkan data yang diperoleh di lapangan dan dapat dijelaskan secara detail. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan secara jelas, sehingga penelitian ini sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian



Gambar 1. 2 Kantor BPBD Kota Surakarta

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta yang terletak di Jl. A. Yani No. 350-354, Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57138. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006), dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau yang berkaitan langsung dengan pokok masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala BPBD Kota Surakarta atau jajaran yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan, Tim Reaksi Cepat, dan beberapa masyarakat yang terdampak.

Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci dalam penelitian (Supomo dkk dalam Purhantara, 2010).

- b. Data Sekunder, merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Sumber data ini biasanya lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk digunakan dalam statistic, biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Daniel, 2002).

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen yang bertujuan untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan, kejadian, kegiatan, pendapat, perasaan dari narasumber. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui tentang strategi komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Kota Surakarta dalam upaya mitigasi bencana banjir di wilayah Kelurahan Sewu. Penggunaan Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Informan dalam penelitian ini

dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi pokok penelitian. Penentuan informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait dengan Strategi Komunikasi Bencana BPBD Kota Surakarta dalam Upaya Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Berdasarkan pemaparan kriteria informan di atas, maka pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa subjek yang memenuhi untuk dilakukan pengambilan data dengan teknik wawancara, diantaranya yaitu; Kepala BPBD Kota Surakarta, Anggota Tim Reaksi Cepat, dan beberapa masyarakat Kelurahan Sewu yang memiliki risiko bencana banjir.

b. Studi Dokumentasi

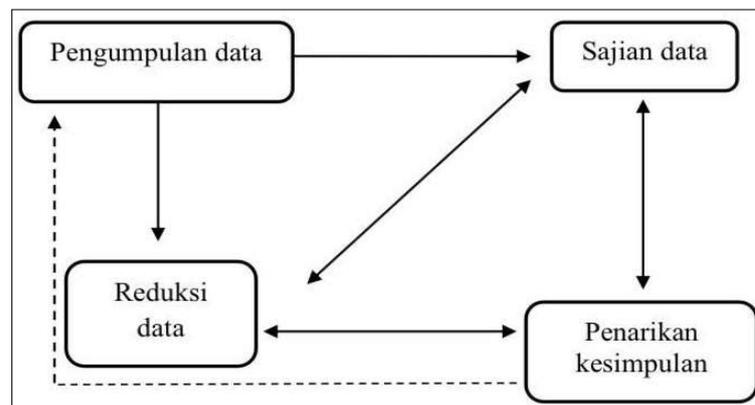
Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek maupun orang lain tentang subjek penelitian. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010).

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan terutama untuk memperkaya landasan-landasan teoretis dan mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Bencana BPBD Kota Surakarta dalam Upaya Mitigasi Bencana di Wilayah Kelurahan Sewu,

Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan pengolahan data. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terusmenerus terhadap data sehingga proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Moleong (2010) menegaskan analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.



Gambar 1. 3 Bagan Teknik Analisis Data Kualitatif
(Miles dan Huberman dalam Sugiyono 2012)

Pada penjelasan lebih lanjut, Miles dan Huberman menjelaskan teknik analisis data model interaktif terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan/atau tahap verifikasi.

a. Pengumpulan data

Proses penyajian data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan

merupakan proses pengumpulan data.

b. Reduksi data

Reduksi data artinya merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang penting sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan penyusunan informasi yang didapatkan peneliti sehingga memunculkan kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, teks naratif, grafik dan matriks.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari penelitian tersebut.

6. Uji Keabsahan Data

Pengujian diperlukan untuk memenuhi kredibilitas data dalam sebuah penelitian. Data dapat dinyatakan valid apabila data dalam penelitian kualitatif tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas data yang terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikit-banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber dengan data yang diperlukan (Afrizal, 2014).

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Trianggulasi. Menurut Moleong (2010) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim (dalam Moleong, 2010) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, peneliti, dan teori.

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2010) triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2012) menjelaskan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Dengan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Apabila data yang diperoleh selama penelitian setelah dicek kembali pada sumber data asli ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang teruji dan pasti kebenarannya (Arikunto, 2010). Trianggulasi dilakukan untuk memperkuat data, serta memastikan terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang diperoleh peneliti.